



Rancangan Akhir

RENJA

**Rencana Kerja
Perangkat Daerah**

2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Kusumanegara No. 9, Semaki, Yogyakarta

Telp: (0274) 512063, 512772 Faks: (0274) 581335

Website: <https://disperindag.jogjaprov.go.id/>

Email: program_indagkop@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan. Perubahan Rencana Kerja SKPD ini adalah suatu dokumen perencanaan kerja berdasarkan RKPD DIY tahun 2025.

Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 ini memuat evaluasi Renja tahun 2025, tujuan, sasaran, Program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diusulkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya penjabaran lebih lanjut Renstra-SKPD dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun setiap tahun.

Penyusunan Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya issue strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data dan kontribusi terhadap tersusunnya Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Yuna Pancawati, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	71
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	112
BAB IV PENUTUP	118

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 diuraikan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik dari segi materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, yang melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Rencana pembangunan disusun dalam bentuk rangkaian program dan kegiatan yang diatur berdasarkan skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Secara sederhana, pembangunan nasional dibedakan menjadi pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan sektoral merupakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada kepentingan nasional. Sedangkan pembangunan regional adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas di tingkat daerah yang berotorisasi otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional menegaskan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat. Selain itu, pembangunan daerah bertujuan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkupnya meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang mencakup RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendorong prakarsa dan peran serta aktif masyarakat. Selain itu, akan ditingkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan

terpadu, yang bersifat nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021, tanggal 22 September 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta rincian tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 menetapkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- e. peningkatan keg'a sama industri dan perdagangan;
- f. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- g. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- h. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- i. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
- j. fasilitasi sarana dan prasarana industri
- k. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- l. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya;
- m. fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna
- n. fasilitasi kemasan dan produk kulit
- o. pengawasan distribusi bahan berbahaya;

- p. penerbitan surat keterangan asal dan fasilitasi angka pengenal impor;
- q. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- r. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- s. fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
- t. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- u. koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- v. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- w. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- x. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- y. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
- z. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- aa. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- bb. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2026 didasarkan pada kebijakan nasional, RPJP, RPJM, Renstra Kementerian, RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD. Rencana ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, SKPD memiliki kewajiban untuk menetapkan Renja setiap tahunnya.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Renja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan DIY disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arahan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas serta tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2026. Selain itu, Renja Disperindag Tahun 2026 ini juga menggambarkan agenda, program, strategi, dan kebijakan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan pada tahun tersebut.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, telah dilakukan proses yang transparan dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai forum konsultasi, rapat dengar pendapat, serta sarana komunikasi yang terbuka, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan tanggapan terhadap rencana yang sedang disusun. Keterlibatan aktif ini bertujuan memastikan bahwa Renja 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, serta aspirasi masyarakat, sehingga program yang dirancang dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat optimal bagi seluruh stakeholder. Proses partisipasi publik ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sinergi dan menciptakan kebijakan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
5. Perda RPJPD DIY No. 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;

6. Perda RPJMD DIY No. 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023–2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan untuk menjaga konsistensi penggunaan dana, memastikan kesinambungan dalam perencanaan, serta menyusun program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan sektoral berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 serta Kebijakan Nasional.
- b. Untuk mewujudkan sinergi dan akselerasi dalam pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama, serta menjadi komitmen seluruh pihak sesuai dengan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan jangka menengah (Renstra) menjadi Rencana Kerja Tahunan yang lebih operasional;
2. Untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah;
3. untuk menjadi dasar penyusunan anggaran perangkat daerah;
4. Sebagai alat monitoring dan evaluasi;
5. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum serta
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG TAHUN 2023.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindag Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disperindag.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja Disperindag
3. Program dan Kegiatan

Bab VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab VI : PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindag Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Disperindag

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Disperindag tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Disperindag bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disperindag dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta untuk menilai realisasi pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Disperindag. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada tahun 2024 bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp60.670.842.394,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 mencapai Rp55.976.854.632,- atau sebesar 92,26% dari total anggaran yang dialokasikan.

Pada tabel 2.1 disajikan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Disperindag dan pencapaian renstra Disperindag s/d tahun 2024.

**Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	3	0	1	1.000.000.000	100	2	2	67%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	9	0	1	1.000.000.000	100	2	2	22%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	14,84	0	13,38	12.960.000.000	111,14	13,78	13,78	93%
		Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	0	0	0	12.960.000.000	0	0	0	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100	0	0	1.000.000.000	0	100	100	100%
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	31.545	6.145	6.200	11.960.000.000	100	6.300	6.300	20%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	415.000	412.630	413.500	3.550.000.000	90,32	414.000	414.000	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	89,5	0	84	3.550.000.000	101,19	86,5	86,5	97%

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3	3	3	3.550.000.000	100	3	3	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	18.043	0	16.543	20.000.000	142,55	17.043	17.043	94%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	40	36	37	20.000.000	100	38	38	95%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	900	365	600	120.000.000	425,33	700	700	78%
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS	925	125	200	120.000.000	100	200	200	22%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100	0	60	350.000.000	100	75	75	75%

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	100	0	100	350.000.000		100	100	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	85	85	23.418.250.000	112,32	85	85	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan , Penganggran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah.	100	100	100	98.000.000	100	100	100	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	17.704.830.000	100	100	100	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	45.000.000	100	100	100	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	620.890.000	100	100	100	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	2.257.030.000	100	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	2.330.000.000	100	100	100	100%

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	362.500.000	100	100	100	100%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	635	515	545	35.000.000	103,67	575	575	91%
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	99	92	94	35.000.000	100	96	96	97%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90	0	90	685.000.000	111,11	90	90	100%
		Inflasi Pangan Bergejolak	0	0	0	685.000.000		0	0	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	25	685.000.000	100	25	25	100%

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20	17	20	960.000.000	231	20	20	100%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	2.015	230	371	960.000.000	100	427	427	21%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	97,5	0	96	306.000.000	104,1	96,5	96,5	99%
		Persentase penanganan sengketa konsumen	99	0	96	306.000.000	104,17	97	97	98%
		Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	0	0	0	306.000.000	0	0	0	
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	125	35	30	280.000.000	100	25	25	20%
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	25	26.000.000	100	25	25	100%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,74	2,63	2,64	1.250.000.000	120,83	2,65	2,65	97%

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) (2025)	Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NEGERI									
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	65	0	50	1.250.000.000	100	55	55	85%

Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini.

- a. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi
- b. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- c. Adanya sinyal positif pada negara tujuan Utama ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok.
- d. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- e. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global
- f. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya:
 - o Indonesia - Chile
 - o Indonesia - Uni Emirat Arab
 - o Indonesia - Mozambik
 - o Indonesia - Australia
 - o Indonesia - Hongkong
- g. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk
- h. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya:
 - o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat
 - o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online
 - o Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha)
- i. Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan periode Januari - Oktober meningkat dari US\$ 386,15 Juta tahun 2023 menjadi US\$ 435,71 Juta di tahun 2024. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN.

- j. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis.
- k. Peningkatan impor bahan baku juga mengalami peningkatan dari tumbuh 56,41% (yoy) menjadi 62,44% (yoy) pada triwulan III 2024.
- l. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal (mesin dan peralatan lainnya) pada triwulan I 2024 tumbuh 252,65% hal ini tentu berdampak pada produksi TW IV
- m. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi

Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
- b. Maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah.
- c. Penurunan permintaan ekspor tahun 2024 khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY.
- d. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yang terlalu ketat dari negara pengimpor.
- e. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas.
- f. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
- g. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik terutama ke Eropa karena tidak bisa melewati laut merah.
- h. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut Menkopolhukam Budi Gunawan, dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun (sumber CNBC Indonesia).
- i. Meningkatnya impor produk legal yang tentu saja akan menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY.

- j. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor sehingga berimbas pada industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
- k. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu) serentak Tahun 2024 berimbas pada dinamika industri MICE. Hal ini terlihat setidaknya dari tiga aspek, yakni perizinan, anggaran pengadaan acara berkurang, serta pihak swasta yang cenderung menahan diri pada tahun politik.
- l. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan melalui pengkajian terhadap capaian kinerja sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang dihasilkan dari pelayanan tersebut. Selain itu, analisis ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam melakukan analisis kinerja pelayanan SKPD, digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Target pencapaian indikator tersebut disesuaikan dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada Tabel 2.2 disajikan capaian kinerja pelayanan Disperindag DIY berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra SKPD.

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kontrib usi Industri Pengola ha n Terhad ap PDRB DIY			12,10 %	12,15 %	12,20 %	12,25 %	11,82%	11,83%	12,20 %	12,25 %	
2	Kontrib usi Perdag ang an Terhad ap PDRB DIY			8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,17%	8,07%	8,44 %	8,49 %	
3	Laju pertum bu han Industri Pengola ha n dalam PDRB			n/a	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,26%	3,63%	3,00 %	3,50 %	
4	Laju pertum bu han Perdag ang an			n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	4,29%	3,94%	5,38 %	5,43 %	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dalam PDRB											
5			Persentase Terelesaikannya Dokumen RPIP Sampai dengan Ditetapkannya Menjadi Perda	100	100	100	100	100	100	100	100	
6			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
7			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	100	100	100	100	100	100	100	100	
8			Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
9			Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2,19	93,96	93,96	93,96	2,19	93,96	93,96	93,96	
10			Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
11			Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12			Persentase Data Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten / Kota yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar Lintas Kab. / Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
13			Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	2	3,9	3,9	3,9	2	3,9	3,9	3,9	
14			Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	93,6	68,22	68,22	68,22	93,6	68,22	68,22	68,22	
15			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	
16			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100	100	100	100	100	100	100	100	
17			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	11,62	n/a	n/a	n/a	11,62	n/a	n/a	n/a	
18			Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) Bebas Bea yang Diterbitkan	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19			Persentase Rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100	
20			Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang Diterbitkan	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	
21			Persentase Penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	
22			Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	
23			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terhadap Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida per Tahun di Provinsi	59,24	49,52	49,52	49,52	59,24	49,52	49,52	49,52	
24			Jumlah Barang Beredar yang Diawasi	1.095,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	1.095,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	
25			Beroperasinya Pusat Distribusi yang Melayani Wilayah Provinsi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
26			Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,47	9,11	9,11	9,11	5,47	9,11	9,11	9,11	
27			Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	100	100	100	100	100	100	100	100	
28			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk	39,26	n/a	n/a	n/a	39,26	n/a	n/a	n/a	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29			Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-19,03	12,17	12,17	12,17	-19,03	12,17	12,17	12,17	
30			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100	
31			Tertib Usaha	100	100	100	100	100	100	100	100	
32			Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	53,32	49,52	49,52	49,52	53,32	49,52	49,52	49,52	
33			Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5,47	9,11	9,11	9,11	5,47	9,11	9,11	9,11	
34			Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	100	100	100	100	100	100	
35			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Pelatihan / Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor	58,9	n/a	n/a	n/a	58,9	n/a	n/a	n/a	
36			Persentase Pelaku Usaha yang Menjadi Eksportir Baru	16,89	n/a	n/a	n/a	16,89	n/a	n/a	n/a	
37			Jumlah Kegiatan yang Dimaksudkan untuk Meningkatkan Citra Produk Ekspor	17	n/a	n/a	n/a	17	n/a	n/a	n/a	
34			Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen	40	40	40	40	40	40	40	40	
35			Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang Teredukasi	975	n/a	n/a	n/a	975	n/a	n/a	n/a	
36			Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	2	6	6	6	2	6	6	6	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	Indikat or *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			(PP-6/2008)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
									(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37			Indeks Kinerja BPSMB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Dari target tahun 2024 sebesar 8,39%, kontribusi sektor industri mencapai 11,86%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 97,59% dengan nilai kriteria sangat baik. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 11,82%, terdapat kenaikan sebesar 0,04% dengan kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 487.321 juta rupiah. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 96,10%.

Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun 2024 mencapai 3,63%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 145,20% (melebihi target). Pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,03% artinya PDRB DIY meningkat dari 118,63 Trilyun di 2023 menjadi 124,59 Trilyun rupiah di 2024. Kontribusi rata rata sektor industri pengolahan pada PDRB DIY di 2024 sebesar 11,86% dari PDRB DIY. Sehingga PDRB sektor industri pengolahan mencapai angka sebesar Rp13.929.575 Juta. Jika dibandingkan dengan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang sebesar Rp.13.442.254 Juta maka terjadi laju pertumbuhan sebesar 3,63%. Dibandingkan PDRB DIY tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar Rp487.321 juta rupiah.

Dari target tahun 2024 sebesar 8,39%, kontribusi sektor perdagangan mencapai 8,04%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 95,83% dengan nilai kriteria sangat baik. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 8,17%, terdapat penurunan sebesar 0,13% dengan penurunan nilai PDRB sektor perdagangan sebesar 360.507 juta rupiah. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 94,14%.

Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB DIY tahun 2024 mencapai 3,94%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 74,06% (dibawah target). Pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,03% artinya PDRB DIY meningkat dari 118,63 Trilyun di 2023 menjadi 124,59 Trilyun rupiah di 2024. Kontribusi rata rata sektor perdagangan pada PDRB DIY di 2024 sebesar 8,04 % dari PDRB DIY. Sehingga PDRB sektor perdagangan mencapai angka sebesar Rp9.519.851 Juta. Jika dibandingkan dengan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang sebesar Rp.9.159.474 Juta maka terjadi laju pertumbuhan sebesar 3,94%. Dibandingkan PDRB DIY tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar Rp360.507 juta rupiah. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 74,06% atau dengan nilai sedang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Disperindag DIY tahun sebelumnya, serta

pencapaian kinerja dalam kerangka Renstra Disperindag DIY, dapat dirumuskan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Perumusan isu-isu tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas, berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan capaian kinerja Renstra Disperindag DIY.

Berikut ini adalah permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang diidentifikasi dari hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra Disperindag DIY.

A. Perindustrian

1. Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran masih kurang mampu mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan terbatasnya jaringan pemasaran.
2. Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain misalnya: serat tumbuhan, kayu, kulit, perak dan bambu.
3. Umumnya IKM masih lemah dalam desain. Dalam memproduksi sebagian pengusaha hanya berdasarkan *Job Order / Buyer Manded*.
4. Kemitraan Usaha pemasaran masih terbatas sehingga jaringan pasar masih terbatas.
5. IKM belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, Manajemen Mutu atau (ISO 9000).
6. Masih banyak barang dijual belum menggunakan SNI.
7. Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif masih mahal.
8. Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan manfaat oleh perajin, tidak didukung dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.
9. Kurang adanya kemitraan yang dapat menampung produk IKM
10. Keterbatasan teknologi dan desain yang dimiliki oleh IKM.

B. Perdagangan

1. Perdagangan Dalam Negeri.
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.

- b. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
 - c. Daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar masih relatif rendah, di sisi lain, sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan.
2. Perdagangan Luar Negeri.
- a. Daya saing rendah, karena mutu, harga dan tidak terjaminnya kontinuitas pasokan barang.
 - b. Masalah pemasaran seperti lemahnya penguasaan jalur distribusi komoditi ekspor, terbatasnya informasi pasar ekspor, kualitas SDM pemasaran yang relatif masih rendah, dan persaingan dengan produk luar negeri.
 - c. Bahan baku beberapa jenis industri mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu.
 - d. Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan di beberapa Kabupaten/Kota di DIY, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang.
 - e. Lemahnya permodalan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD bertujuan untuk membandingkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD serta tingkat kinerja yang telah dicapai oleh SKPD. Proses ini juga mempertimbangkan arahan dari kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja untuk masing-masing program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan oleh SKPD yang bersangkutan.

Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 adalah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disperindag DIY tentu saja akan mendukung tema tersebut.

Prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026, adalah: (1) Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan; (2) Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak; (3) Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta; (4) Penurunan Ketimpangan (antar kelas social); (5) Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan; (6) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram. Disperindag DIY sesuai tugasannya mendukung Prioritas Pembangunan yang ke dua.

Pada tabel 2.3 disajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				51.445.793.760,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				51.445.793.760,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.000.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.000.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3.000.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3.000.000.000,00	
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				3.000.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				3.000.000.000,00	
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		-	-	3.000.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		-	-	3.000.000.000,00	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu					Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	2.500.000.000,00		Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	2.500.000.000,00	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh					Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh					
		Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	500.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1 Dokumen	500.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.560.615.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.560.615.500,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				20.560.615.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				20.560.615.500,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				20.560.615.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				20.560.615.500,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		-	-	1.700.000.000,00	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		-	-	1.700.000.000,00	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya					
		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>	7 Unit	1.700.000.000,00		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>	7 Unit	1.700.000.000,00	
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		-	-	18.860.615.500,00	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		-	-	18.860.615.500,00	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif					Pengembangan Industri Kreatif					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan</i>	31545 Unit	18.860.615.500,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan</i>	31545 Unit	18.860.615.500,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27.885.178.260,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27.885.178.260,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.601.503.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.601.503.000,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				35.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				35.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		-	-	35.000.000,00	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		-	-	35.000.000,00	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	0 Dokumen	35.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	0 Dokumen	35.000.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG				2.779.503.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG				2.779.503.000,00	
	Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		-	-	2.779.503.000,00	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		-	-	2.779.503.000,00	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	20.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	20.000.000,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.759.503.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.759.503.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				120.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				120.000.000,00	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		-	-	120.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		-	-	120.000.000,00	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor					Peningkatan Citra Produk Ekspor					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	4 Produk	120.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	4 Produk	120.000.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				452.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				452.000.000,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-	-	425.000.000,00	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-	-	425.000.000,00	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	45 Pengaduan	425.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	45 Pengaduan	425.000.000,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-	-	27.000.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-	-	27.000.000,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	1 Laporan	27.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	1 Laporan	27.000.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				215.000.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				215.000.000,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		-	-	215.000.000,00	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		-	-	215.000.000,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM</i>	74 UMKM	215.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail,</i>	74 UMKM	215.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			<i>melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>					<i>marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				24.283.675.260,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				24.283.675.260,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.944.507.966,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.944.507.966,00	
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	35.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	35.000.000,00	
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	10.000.000,00	
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	
			DPA-SKPD					DPA-SKPD			
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000,00	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	16.340.832.706,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	16.340.832.706,00	
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	16.265.832.706,00		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	16.265.832.706,00	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan					Pelaksanaan Penatausahaan dan					
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	35.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	35.000.000,00	
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	20.000.000,00	
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD	14 Laporan	20.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	20.000.000,00	
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada		-	-	63.858.190,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada		-	-	63.858.190,00	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah					
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					
	SKPD					SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63.858.190,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63.858.190,00	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	177.060.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	177.060.400,00	
3.31.01.1.06.	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
0001	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3.300.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3.300.000,00	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.300.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.300.000,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4.620.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4.620.000,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	21 Paket	16.900.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	21 Paket	16.900.000,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					
	Perundang-Undangan					Perundang-Undangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	1.940.400,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	1.940.400,00	
3.31.01.1.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD					
0009		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelengg aaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	120.000.000 ,00	
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,0 0	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		-	-	260.048.300,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		-	-	260.048.300 ,00	
	Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	6 Unit	135.048.300,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	135.048.300 ,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	125.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	125.000.000,00	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		-	-	1.628.893.740,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		-	-	1.628.893.740,00	
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	379.559.340,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	379.559.340,00	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.249.334.400,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.249.334.400,00	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	438.814.630,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	438.814.630,00	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.405.600,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.405.600,00	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	266.634.830,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	266.634.830,00	
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2.983.200,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2.983.200,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.876.800,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.876.800,00	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	25 Unit	21.914.200,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	21.914.200,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5.209.167.294,00	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5.209.167.294,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-	-	5.209.167.294,00	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-	-	5.209.167.294,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	815.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	815.000.000,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	4.394.167.294,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	4.394.167.294,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				10.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				10.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		-	-	10.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		-	-	10.000.000,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				120.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				120.000.000,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-	-	120.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-	-	120.000.000,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	120.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	120.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA				2.556.760.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA				2.556.760.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.466.760.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.466.760.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.466.760.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.466.760.000,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.026.760.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.026.760.000,00	
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	9.240.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	9.240.000,00	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan					Pelaksanaan Penatausahaan dan					
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.240.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.240.000,00	
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada		-	-	10.320.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada		-	-	10.320.000,00	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah					
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					
	SKPD					SKPD					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	10.320.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	10.320.000,00	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	39.200.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	39.200.000,00	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi					
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4.200.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4.200.000,00	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	9.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	9.000.000,00	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	2.300.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	2.300.000,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.000.000,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	4.500.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	4.500.000,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					
	Perundang-Undangan					Perundang-Undangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	2.200.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	2.200.000,00	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					
	Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	9.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	9.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		-	-	1.880.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		-	-	1.880.000.000,00	
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	1 Laporan	730.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	730.000.000,00	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	1 Laporan	1.150.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.150.000.000,00	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	88.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	88.000.000,00	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	42.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	42.000.000,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.000.000,00	
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	35.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	35.000.000,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				440.000.000,00	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				440.000.000,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-	-	440.000.000,00	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		-	-	440.000.000,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	440.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	440.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				90.000.000,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				90.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				90.000.000,00	
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				90.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				90.000.000,00	
4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan		-	-	90.000.000,00	Peningkatan Budaya Pemerintahan		-	-	90.000.000,00	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY					Implementasi Budaya Pemerintahan DIY					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	90.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	90.000.000,00	

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY 2026

NO	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AWAL					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
J U M L A H					54.002.553.760,00					54.002.553.760,00	

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindag. Usulan yang ditelaah merupakan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun Disperindag kabupaten/kota. Usulan tersebut terdiri dari usulan yang langsung ditujukan kepada Disperindag, hasil pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan.

Penyusunan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY TA. 2026 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai stakeholder. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah DIY TA. 2026, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat *top down*, sinergitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual. Penyusunan rencana program dan kegiatan Disperindag DIY juga mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut ini.

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH PAKET	PAGU
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	7	66.500.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	280.000.000
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	95.000.000
4	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17	782.000.000
	Grand Total	29	1.223.500.000

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan RI adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Misi Kementerian Perdagangan adalah

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Arah kebijakan kementerian perdagangan dalam pembangunan sektor perdagangan adalah :

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan

3.1.2. Kementerian Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

3.1.3. Telaah atas Program Prioritas Presiden

Harmonisasi program pembangunan industri dan perdagangan di DIY dengan program prioritas Presiden RI tahun 2024-2029 sangat penting untuk memperkuat potensi daerah dan mendukung pencapaian target nasional.

Telaah terhadap relevansi dan peluang sinergi antara program prioritas nasional dan program prioritas daerah perlu dilakukan secara mendalam guna menentukan sinergi yang sesuai, sehingga keduanya dapat saling mendukung dan mempercepat pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Program prioritas presiden terdiri dari Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Program 3 Juta Rumah, Sekolah Rakyat, Rehabilitasi Sekolah, Penuntasan Tuberkulosis, Lumbung Pangan, serta Pembangunan Bendungan dan Irigasi.

Sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok, yang mencakup dampak pada beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi melalui kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dapat disinergikan dan saling mendukung untuk mencapai target kinerja sesuai program prioritas Presiden, yaitu Lumbung Pangan. Sub kegiatan ini, meliputi beberapa aktivitas seperti Pasar Murah, Operasi Pasar, dan Bazar. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, yang melibatkan Bulog dan distributor serta didukung subsidi biaya distribusi, diharapkan masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau dan harga bahan pangan dapat terkendali.

Sub kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan program prioritas presiden adalah Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi pada kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada program Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Sub kegiatan ini dapat disinergikan dengan Program Makanan Bergizi Gratis. Melalui aktivitas pemberian fasilitasi halal kepada pelaku industry kecil menengah pangan

dan pelaksanaan pengawasan yang merupakan aktivitas dalam sub kegiatan tersebut diharapkan produk olahan pangan yang terkait program Makan Bergizi Gratis dapat lebih sesuai standar baik kesehatan maupun standar halal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY melalui program/kegiatannya pada tahun 2026 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3-2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya daya saing sektor Industri	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	2,50 %
2	Terwujudnya daya saing sektor Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,32 %
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, dan Renstra SKPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diusulkan dengan pagu indikatif sebesar **Rp57.392.056.760,-** yang bersumber pada APBD DIY. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah 5 Kab/Kota di DIY.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun

Tabel 3-3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						45.073.528.538,00							61.673.490.070,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.509.139.000,00							4.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.509.139.000,00							4.000.000.000,00	
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG						1.509.139.000,00						-	4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.0 2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	-			3 Dokume n	1.509.139.000 ,00			Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY	-	4.000.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											melalu i peran aktif kopera si.					
	1.03.13.5.0 2.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokume n	1.309.734.000 ,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semu a Kel/De sa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		2.500.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											melalu i peran aktif kopera si.					
	1.03.13.5.0 2.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokume n	199.405.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		1.500.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											melalu i peran aktif kopera si.					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.210.615.00 0,00							20.860.61 5.500,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						19.210.615.00 0,00							20.860.61 5.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						19.210.615.00 0,00						-	20.860.61 5.500,00	
	2.22.08.5.0 6	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya a Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan	-			1 00 %	1.550.000.000 ,00			Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY	-	2.000.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				12 Unit	1.550.000.000 ,00	Kota Yogya karta, Kraton , Pateh an	DANA KEISTIME WAAN DIY	Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		2.000.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											melalu i peran aktif kopera si.					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.0 8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	-			6400 IKM	17.660.615.00 0,00			Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Nilai PDRB Sektor Industri Pengola han	-	18.860.61 5.500,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				31545 Unit	17.660.615.00 0,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Melanj utka n penge mb angan infrastr uktur dan menin g katkan lapang an kerja yang berkua litas, mendo rong kewira usah aan, menge mbang kan industr i kreatif serta menge mba ngkan agrom aritim industr i di sentra produk si	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Nilai PDRB Sektor Industri Pengola han		18.860.61 5.500,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											melalu i peran aktif kopera si.					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						24.353.774.53 8,00							36.812.87 4.570,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.735.185.840 ,00							4.685.000. 000,00	
1,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						14.621.450,00						-	40.000.00 0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				28500 Dokume n	14.621.450,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		40.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						1.986.880.000 ,00						-	3.020.000. 000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.0 2.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/K ota				1 Laporan	4.880.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1.982.000.000 ,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		3.000.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						272.338.680,0 0						-	150.000.0 00,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				4 Produk	272.338.680,0 0	Semu utka n Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Eksporti r DIY		150.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
4,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						527.865.710,0 0						-	530.000.0 00,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				45 Pengadu an	513.665.710,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Masyar akat/Ko nsum en DIY		500.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.30.06.1.0 3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	-			25 Jenis	14.200.000,00			Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Masyar akat/Ko nsum en DIY	-	30.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.					
	3.30.06.1.0 3.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	14.200.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Masyar akat/Ko nsum en DIY		30.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dalam negeri.					
5,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						933.480.000,0 0						-	945.000.0 00,00	
	3.30.07.1.0 2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	-			58 UMKM	933.480.000,0 0			Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY	-	945.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											tamba h di dalam negeri.					
	3.30.07.1.0 2.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				58 UMKM	933.480.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		945.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokume n	6.160.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		15.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokume n	10.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		11.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.400.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				1 Dokume n	35.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		40.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				14 Laporan	20.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD						a Kel/De sa							
	3.31.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	63.858.190,00			-	-	Disperin dag DIY	-	70.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	63.858.190,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		70.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	141.991.400,0 0			-	-	Disperin dag DIY	-	5.194.940. 400,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.300.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		4.000.000, 00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.451.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		25.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.300.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		4.000.000, 00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokume n	1.940.400,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		1.940.400, 00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.480.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		120.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik				1 Dokume n	1.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>pada SKPD</i>						Semu a Kel/De sa							
	3.31.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	46.243.000,00			-	-	Disperin dag DIY	-	250.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	15.753.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		100.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan</i>				1 Unit	30.490.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		150.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lainnya yang Disediakan						atan, Semu a Kel/De sa							
	3.31.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-			100 %	1.467.324.000 ,00			-	-	Disperin dag DIY	-	1.628.893. 740,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	372.924.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		379.559.3 40,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.094.400.000 ,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		1.249.334. 400,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a Kel/De sa							
	3.31.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanann y a Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-			1 00 %	406.068.900,0 0			-	-	Nilai PKKI Progra m Penunja ng Urusan Pemer ntah Daerah	-	447.040.4 30,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.405.600,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Progra m Penunja ng Urusan Pemer ntah Daerah		36.405.60 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13 Unit	252.497.300,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Progra m Penunja ng		266.634.8 30,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Progra m Penunja ng Urusan Pemer intah Daerah		110.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
	3.31.01.1.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				15 Unit	20.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nilai PKKI Progra m Penunja ng Urusan Pemer intah Daerah		20.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
2,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						2.408.376.200 ,00						-	6.250.000. 000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementa sikan				1 Dokume n	704.240.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		2.000.000. 000,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
3,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						3.599.800,00						-	11.000.00 0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokume n	3.599.800,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		11.000.00 0,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
4,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						48.720.000,00						-	150.000.0 00,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpula n, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokume n	48.720.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	IKM DIY		150.000.0 00,00	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGA NGAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						2.472.994.630 ,00							4.936.020. 000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.382.994.630 ,00							4.786.020. 000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.382.994.630 ,00							4.786.020. 000,00	
1,	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.963.894.630 ,00						-	4.286.020. 000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.996.650,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		9.000.000, 00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.106.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		2.000.000. 000,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.246.740,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		11.000.00 0,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/De sa							
	3.31.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.932.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		4.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperindag DIY		2.200.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.400.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		9.000.000, 00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.636.381.350 ,00			-	-	Disperin dag DIY	-	1.880.000. 000,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	687.781.350,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		730.000.0 00,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	948.600.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		1.150.000. 000,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksanann ya Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-			100 %	279.475.300,0 0			-	-	Disperin dag DIY	-	338.000.0 00,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	38.185.800,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		42.000.00 0,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											RITAS NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	10.687.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		11.000.00 0,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	221.492.000,0 0	Kota Yogya karta, Umbul harjo, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		250.000.0 00,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				30 Unit	9.110.500,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperin dag DIY		35.000.00 0,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokume n	419.100.000,0 0	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanj utka n hilirisa si dan menge mbang kan industr i berbas is sumbe r daya alam untuk meni ngkatk an nilai tamba h di dalam negeri.	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Disperin dag DIY		500.000.0 00,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						90.000.000,00							150.000.0 00,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						90.000.000,00							150.000.0 00,00	
1,	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N						90.000.000,00						-	150.000.0 00,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIO			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintah an DIY				1 Dokume n	90.000.000,00	Semu a Kota/K ab, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egaha n dan pembe rant asan korups i, narkob a, judi, dan pe nyelud upan .	2. Peng em bang an kehid upan ekon omi yang layak	Disperin dag DIY		150.000.0 00,00	BALAI PENGEMB ANGAN TEKNOLO GI TEPAT GUNA
	J U M L A H							47.546.523.16 8,00							66.609.51 0.070,00	

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2026 akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di DIY. Secara umum, pembinaan sektor industri dan perdagangan di DIY Tahun 2026 akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, lomba, temu kemitraan, tes pasar, dan pameran.

Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Uraian	PENGHANTARAN KUA PPAS 2026
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.509.139.000
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN ATA RUANG	1.509.139.000
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.509.139.000
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.309.734.000
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	199.405.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.210.615.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	19.210.615.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.210.615.000
2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.550.000.000
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.550.000.000
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	17.660.615.000
2.22.08.1.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	17.660.615.000
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	90.000.000
4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	90.000.000
4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	90.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.736.769.168
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.735.185.840
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14.621.450

3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	14.621.450
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	14.621.450
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.986.880.000
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.986.880.000
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4.880.000
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.982.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	272.338.680
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	272.338.680
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	272.338.680
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	527.865.710
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	513.665.710
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	513.665.710
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	14.200.000
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	14.200.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	933.480.000
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	933.480.000
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	933.480.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	23.001.583.328
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.121.787.328
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.560.000
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.160.000
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000

3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.020.087.208
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.935.847.208
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.240.000
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000
3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.178.190
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.178.190
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.469.380
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.254.500
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.447.650
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.406.000
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.866.740
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.832.090
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.782.400
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.880.000
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.243.000
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.753.000
3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.490.000
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.103.705.350
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.060.705.350
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.043.000.000
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.544.200
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.405.600
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.683.100
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.983.200
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.869.800
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.492.000
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.110.500
3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000

3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.827.476.200
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.827.476.200
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	692.319.700
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	419.100.000
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.011.816.500
3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	704.240.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.599.800
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.599.800
3.31.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	3.599.800
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	48.720.000
3.31.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	48.720.000
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	48.720.000
	TOTAL BELANJA	47.546.523.168

Kegiatan yang direncanakan Disperindag DIY tentu saja selaras dengan tema pembangunan Pemda DIY 2026, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini diantaranya bermakna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum, rencana kegiatan Disperindag DIY bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor industri serta perdagangan dengan fokus utama pada peningkatan produksi dan pemasaran.

Peningkatan produksi akan dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti pelatihan, pemberian bantuan peralatan produksi, serta sertifikasi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Sedangkan untuk mendukung pemasaran, akan dilaksanakan pelatihan pemasaran, fasilitasi partisipasi dalam pameran, dan penyelenggaraan pameran guna memperluas pasar dan memperkenalkan produk unggulan daerah.

Selain itu, Disperindag DIY juga akan menyelenggarakan berbagai sosialisasi guna mensosialisasikan kebijakan di sektor industri dan perdagangan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dalam rangka perlindungan konsumen, direncanakan kegiatan penyelesaian sengketa konsumen dan pengawasan barang beredar untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk di pasaran.

Semua aktivitas tersebut akan diwadahi dalam berbagai sub kegiatan yang mendukung penguatan sektor industri dan perdagangan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender, Disperindag DIY merencanakan pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan peran wanita dalam aktivitas perekonomian di DIY, mengingat peran mereka yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai kegiatan ini akan melibatkan kaum perempuan secara aktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka, seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi perempuan dalam perekonomian daerah, mendorong kesetaraan gender, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di DIY.

Agar sektor industri dan perdagangan dapat berkinerja lebih baik, perlu ditingkatkan kerjasama lintas sektor secara lebih efektif. Sektor ini membutuhkan dukungan dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat penyediaan bahan baku lokal, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan, terutama dari aspek manajerial dan kelembagaan, juga sangat diperlukan dan dapat difasilitasi oleh Dinas Koperasi. Tak kalah penting, kemudahan perizinan berusaha harus didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar proses perizinan menjadi lebih efisien dan mendukung pertumbuhan usaha di daerah. Sinergi dari berbagai sektor ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri dan perdagangan yang lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. c. Identifikasi rencana kebutuhan Kebijakan/Rencana regulasi yang diperlukan untuk dibuat di tahun 2026

Tabel 4-2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Renja Perubahan 2025	Anggaran 2026	OPD Pengampu
1	Lumbung Pangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.198.393.000	1.982.000.000	Disperindag DIY
2	Makanan Bergizi Gratis	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi		710.000.000	Disperindag DIY

BAB 5 PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY Tahun 2023-2027 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2027. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang industri dan perdagangan DIY, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang didukung melalui partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di DIY, sehingga hasil yang optimal dapat dicapai. Oleh karenanya Dokumen Renja ini merupakan dokumen yang penting mengingat berisi panduan Disperindag DIY dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2026.

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal untuk pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) akan dilakukan oleh Disperindag DIY dengan beberapa langkah dan mekanisme sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Monitoring Berkala

Kepala Disperindag DIY melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan dalam Renja. Monitoring ini dapat dilakukan melalui rapat internal, laporan berkala, dan kunjungan lapangan.

b. Evaluasi Kinerja dan Hasil

Melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan dan penggunaan anggaran secara periodik, misalnya bulanan atau triwulan, untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan target tercapai.

c. Penyusunan Laporan Berkala

Kepala Disperindag DIY menyusun laporan kemajuan dan capaian kegiatan yang kemudian dievaluasi oleh pimpinan dan unit pengawas internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d. Pengendalian Internal

Kepala Disperindag DIY menerapkan sistem pengendalian internal yang meliputi pengawasan administratif, keuangan, dan operasional guna mencegah penyimpangan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur.

e. Koordinasi dan Konsultasi

Melakukan koordinasi secara rutin dengan unit-unit terkait dan stakeholder untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

f. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan dan instansi terkait serta melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi evaluasi.

Sebagaimana amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di DIY diturunkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 52 Tahun 2010 dan Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Pemda DIY. Disperindag DIY akan melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan tersebut agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi penyalahgunaan aset, dan seluruh transaksi keuangan dicatat secara andal serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renja 2026 merupakan bahan dasar dalam penyusunan dokumen anggaran, penjabaran secara rinci dalam ROPK, penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan SKP Individu, serta penyusunan registrer risiko dan kegiatan terkait lainnya.

Disperindag DIY selalu terbuka terhadap kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.